KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Bertemu Parlemen AS, DPR Bahas RUU Penguatan Lembaga Perwakilan
Tanggal : Kamis, 02 Mei 2019
Surat Kabar : Republika
Halaman : 2

Bertemu Parlemen AS

DPR Bahas RUU Penguatan Lembaga Perwakilan

FOTO: DOK.DPR



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dan Tim Implementasi Reformasi Parlemen menuntaskan muhibah ke Amerika Serikat (AS), sejak Senin (29/4) sampai dengan hari Ahad (5/5).

Selama *muhibah*, delegasi DPR RI yang terdiri dari Anggota DPR seperti Arsul Sani (F-PPP), Sodiq Mujahid (F-Gerindra), Ibnu Munzir (F-PG) dan M. Lutfhi (F-Nasdem), Sekretariat Jenderal (Setjen),Badan Keahlian DPR, Tim Perumus UU dan Tenaga Ahli menemui *Congressional Research Service,* Sekretariat Jenderal *House of Representatives,* Anggota Parlemen dari Partai Republican Rodney Davis.

Selain untuk mendapatkan masukan dalam rangka penguatan sistem pendukung DPR, delegasi juga bertemu dengan USA-Indonesia Society (USINDO), *Congressional Institute* di Alexandria dan lembaga Think Tank tertua yakni Brooking di Washington DC.

Muhibah delegasi Tim Implementasi Reformasi Parlemen ke Amerika Serikat kali ini, menurut Fahri Hamzah selaku ketua tim adalah untuk mendapatkan masukan atas 1 paket dari 6 Rancangan Undang-Undang (RUU) Penguatan Lembaga Perwakilan yakni MPR, DPR, DPD dan DPRD serta Lembaga Etik dan Tata Kelola Keuangan DPR.

Keenam RUU Lembaga Perwakilan yang berdiri sendiri yaitu pertama RUU tentang MPR, kedua RUU tentang DPR, ketiga RUU tentang DPD, keempat RUU DPRD, kelima RUU tentang Etika Lembaga Perwakikan dan terakhir RUU tentang Lembaga Parlemen.

Keenam RUU tersebut mengatur secara terpisah, agar masing-masing lembaga ditempatkan kedudukan yang kuat sesuai dengan amanat konstitusi.

"Dengan paket UU ini diharapkan DPR akan punya posisi yang makin kuat dan mandiri dalam menjalankan fungsi-fungsi utamanya dalam sistem politik di Indonesia," kata Fahri.

Meski fahri mengakui kalau reformasi dan amandemen UUD 1945 telah melakukan penataan lembaga-lembaga negara pada kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk memperkuat mekanisme *checks and balances* dalam sistem pemerintahan Presidensil.

Namun, lembaga perwakilan rakyat yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara 1945 belum berperan secara maksimal sebagai representasi rakyat yang mengontrol kebijakan pemerintah, karena masih banyak lubang-lubang dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

"Mekanisme *checks and balances* antara lembaga negara tidak berjalan dengan maksimal, karena dalam kenyataannya, kekuasaan eksekutif masih dominan," kata Fahri.

Maka dari itu, *blue print* Implementasi Reformasi Parlemen merupakan *road map* penguatan lembaga perwakilan yang mencakup tiga bidang, yaitu penguatan bidang kelembagaan, penguatan sistem pendukung, dan penguatan kemandirian kelembagaan.

"Kami akan memperbaiki RUU tentang Reformasi Parlemen ini, dan kita akan mencoba dalam 5 bulan ini. Karena pada tanggal 1 Oktober dimana akan menjadi integrasi anggota Dewan yang baru terpilih," ucap Fahri Hamzah dalam pertemuannya dengan US *Congressional Institute* di Virginia, Senin (29/4).

Harus dibenahi

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar mengatakan dalam mengimplementasikan reformasi pada fungsi kedewanan, masih banyak hal yang harus dibenahi oleh Sekretariat Jenderal (Setjen) dan Badan Keahlian (BK) DPR RI. Dimana lembaga ini berperan sebagai *supporting system* terutama dalam mewujudkan konsep parlemen modern.

"DPR ini juga dituntut memiliki fungsi berfikir, maka kesetjenan sebagai fasilitator dari fungsi berfikir harus kuat. Jadi Kesetjenan juga akan di reformasi," kata Indra terkait penyempurnaan *Blue Print* Implementasi Reformasi.

Pihaknya menginginkan kedepan harus ada suatu pemikiran tentang reformasi kedewanan serta ada aturan atau undang-undang yang nantinya dapat memaksimalkan fungsi kerja dewan dan *supporting system* di dalamnya, demi mewujudkan kemandirian kelembagaan. ● ril.